

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- BPK. 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK. 2014 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Cestar, Ali. “KPK Rilis Peta Potensi Korupsi Desa”. <http://desamerdeka.co.id/dana-untuk-73-ribu-desa-rawan-kpk-rilis-petapotensi-korupsi-desa/>. Diakses pada tanggal 12 September 2015.
- Drs. S. Munawir, (1995), Analisa Laporan Keuangan, Liberty Yogyakarta
- Fontanella, Amy dan Rossieta, Hilda. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 17.
- Fakhri, Fakhrizal. “BPK Temukan Kejanggalan Laporan Keuangan Pemprov DKI”. <http://news.okezone.com/read/2015/07/06/338/1177294/bpk-temukan-kejanggalan-laporan-keuangan-pemprov-dki>. Diakses pada tanggal 12 September 2015
- Ghozali, Imam. (2001). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2001). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halachmi, Arie. 2005. *Performance measurement is only one way of managing performance. International Journal of Productivity and Performance Management*. Vol. 54: 502-516.

- Halim, Abdul. 2001. *Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*. Edisi Kedua, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Hatch, E. , & Farhady, H. 1981. *Research Design & Statistics for Applied Linguistics*. Tehran: Rahnama Publications.
- Herminingsih, 2009. *Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Demak)*. Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian*. Edisi 1. Yogyakarta: Penerbit BPFY Yogyakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia . 2007 . *Standar Akuntansi Keuangan* . Edisi 2007. Penerbit : Salemba Empat . Jakarta .
- Litvack, J. and J. Seddon, Eds. (1999). *Decentralisation Briefing Notes*. Washington, D.C., World Bank Institute.
- Liu, Chih hung (2007). *What Type of Fiscal Decentralization System has better Performance*. School of Public Policy
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Andi.
- Moisiu, Alexander (2013). Decentralizations and The Increased autonomy in Local Governments, Procedia-Social and Behavioral Sciences, pp.459-463*
- Mulyadi. 2002. *Auditing, Edisi Keenam, Buku Satu dan Dua*. Salemba Empat. Jakarta
- Mulyadi, 2007, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan.
- Pramono, Joko . 2014. Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Rinaldi, Taufik, Marini Purnomo dan Dewi Damayanti (2007). Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah”. Bank Dunia: Justice for the Poor Project .
- Sasana, Hadi, 2006. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.